

Tantangan Dan Peluang Sistem Administrasi Negara Indonesia Di Era Digital

¹Nesa Ananda Putri, ²Lidia Pasaribu, ³Nur Anisa, ⁴Putri Khairunnisa, ⁵Erinaldi

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Korespondensi : erinaldipratama2905@gmail.com

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada identifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, adanya kesenjangan akses digital antar wilayah, rendahnya tingkat literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan peluang besar melalui penerapan e-government, pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Kata kunci : Digitalisasi, Administrasi Negara, E-Government, Tantangan, Peluang.

Abstract

This study focuses on identifying various challenges and opportunities in Indonesia's state administrative system in the digital era. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through a literature review of academic journals, books, government policy documents, and other relevant sources. Data analysis is conducted through stages of categorization, interpretation, and conclusion drawing based on the main themes identified. The findings indicate that digitalization has contributed positively to improving efficiency, transparency, accountability, and the quality of public services. However, its implementation still faces several challenges, including limited technological infrastructure, disparities in digital access across regions, low levels of digital literacy, and resistance to change within the bureaucracy. On the other hand, digitalization also presents significant opportunities through the implementation of e-government, the development of management information systems, and increased public participation in governance processes.

Keyword: Digitalization, Public Administration, E-Government, Challenges, Opportunities

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang diiringi oleh kemajuan signifikan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong digitalisasi menjadi elemen penting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan ini memicu pergeseran paradigma dalam tata kelola administrasi negara, dari model konvensional ke sistem digital yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut melalui inovasi berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan (Development., 2020). Administrasi negara memiliki peran strategis dalam mengatur, mengelola, serta penyediaan layanan bagi masyarakat. Dalam perkembangan era digital, fungsi administrasi publik tidak lagi terbatas pada proses administratif manual, tetapi juga mencakup integrasi teknologi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut selaras dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, penerapan digitalisasi dalam administrasi negara menjadi langkah yang wajib dilakukan, terutama dalam menjawab tuntutan Masyarakat yang terus berkembang, semakin kompleks, dan dinamis. (Programme, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres No 95 Tahun 2018. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terintegrasi. Selain itu, pengembangan *e-government* turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses layanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan responsif (Presiden Republik Indonesia, 2018). Namun demikian, penerapan digitalisasi dalam administrasi negara di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah yang mengakibatkan belum meratanya akses terhadap layanan berbasis teknologi. Di samping itu, tingkat literasi digital yang masih rendah, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah, juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi. Permasalahan lainnya meliputi belum terintegrasinya sistem antarinstansi secara maksimal, serta adanya resistensi terhadap perubahan di dalam birokrasi yang masih cenderung mempertahankan pola kerja konvensional (Bank, 2021).

Berdasarkan data terkini, tingkat penetrasi internet di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Pada tahun 2025, penetrasi internet mencapai sekitar 80,66% dari total populasi, dengan dominasi wilayah Pulau Jawa dibandingkan wilayah lainnya seperti Maluku dan Papua yang masih memiliki tingkat akses lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses digital masih menjadi tantangan utama dalam mendukung keberhasilan digitalisasi administrasi negara secara nasional (Databoks, 2025).

Tabel I.1
Wilayah yang Kesenjangan Digital Tahun 2025

No	Wilayah	Tingkat Presentase
1.	Jawa	84,69%
2.	Kalimantan	78,72%
3.	Sumatera	77,12%
4.	Sulawesi	71,64%
5.	Maluku - Papua	69,26%

Sumber Data: Databoks, Tahun 2025

Di sisi lain, digitalisasi administrasi negara juga memberikan berbagai peluang strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, teknologi digital juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan melalui berbagai platform digital, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis serta mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain itu, digitalisasi juga mendorong terwujudnya *data-driven governance*, yaitu pendekatan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada data akurat dan mutakhir secara waktu nyata. Pendekatan ini memberi kemungkinan pemerintah merancang kebijakan yang mampu menjangkau sasaran serta meningkatkan mutu perencanaan pembangunan. Namun demikian, penerapan sistem berbasis data juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, yang harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan (Bank, 2021). Beberapa studi sebelumnya mengungkapkan bahwa transformasi digital dalam administrasi negara berkontribusi secara positif terhadap peningkatan mutu layanan publik. Heeks (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *e-government* sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi aparatur, dukungan infrastruktur teknologi, serta adanya dukungan kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Penelitian Nugroho & Sari (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik di Indonesia masih menemui tantangan terkait integrasi sistem dan kemampuan aparatur. Sementara itu, Pratama (2023) mengindikasikan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat literasi digital di beberapa wilayah.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dirancang dengan implementasinya di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan transformasi digital dalam administrasi negara. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan guna memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia pada era digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan digitalisasi. Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsive terhadap perubahan, mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, terbuka dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

2. METODE

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait tantangan dan peluang sistem administrasi negara Indonesia di era digital. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam terkait fenomena digitalisasi administrasi negara berdasarkan kajian dari berbagai sumber ilmiah. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara kontekstual tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan melalui analisis terhadap data sekunder yang relevan.

Penelitian ini difokuskan pada kajian literatur (*library research*), yaitu penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan administrasi negara, digitalisasi pemerintahan, *e-government*, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Studi kepustakaan ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat mengenai dinamika sistem administrasi negara pada masa transformasi digital, khususnya terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia (Indrayani, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai referensi, seperti buku akademik, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, artikel penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi dari lembaga terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai *platform* akademik, di antaranya Google Scholar, SINTA, Garuda, serta situs resmi instansi pemerintah. Seleksi sumber dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan

kesesuaian topik, aktualitas publikasi, serta tingkat kredibilitasnya, sehingga data yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk mendukung analisis secara tepat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan literatur sesuai dengan fokus kajian, pengelompokan data berdasarkan tema utama berupa tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara di era digital, analisis serta perbandingan temuan dari berbagai sumber, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sistem administrasi negara Indonesia pada era digital. Pendekatan ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman terkait berbagai permasalahan yang dihadapi, sekaligus mengidentifikasi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem administrasi negara berbasis digital di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi menuju sistem digital dalam administrasi negara Indonesia merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di era modern. Berbagai kebijakan telah dirancang oleh pemerintah untuk mendorong proses tersebut, di antaranya melalui penerapan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki efisiensi kerja, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperbaiki mutu pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. (R. Nugroho, 2018).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi. Pemanfaatan sistem berbasis elektronik memungkinkan instansi pemerintah untuk menyederhanakan prosedur birokrasi yang sebelumnya cenderung berbelit menjadi lebih cepat, terukur, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga berperan dalam memperkuat koordinasi antarinstansi melalui integrasi data dan sistem yang saling terhubung, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti (Komarudin, Mu, Praja, & Setiawan, 2025). Dalam praktiknya, penerapan SPBE di berbagai lembaga pemerintah menunjukkan adanya peningkatan efisiensi kerja serta transparansi dalam pengelolaan administrasi public.

Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi negara memberikan berbagai manfaat, seperti percepatan pelayanan publik, kemudahan akses informasi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah. Melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara lebih cepat tanpa harus datang langsung ke instansi terkait. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penerapan digitalisasi mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja administrasi negara secara keseluruhan (Pasolong, 2019).

Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi administrasi negara di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum tersebar secara merata di seluruh wilayah. Walaupun tingkat penetrasi internet di Indonesia telah melampaui 80%, kesenjangan akses masih terlihat jelas antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi ini mengakibatkan belum seluruh masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal (Kusuma, Yendra, Bakhtiar, & Takdir, 2024).

Selain itu, tingkat literasi digital yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem administrasi yang didukung digital. Baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Hal ini

berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan digital serta kurang optimalnya implementasi kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah (Kusuma et al., 2024). Namun demikian, optimalisasi penerapan sistem digital dalam pemerintahan tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis. Keterbatasan kesiapan infrastruktur teknologi di sejumlah daerah masih menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan layanan berbasis elektronik, terutama di wilayah yang memiliki akses jaringan internet yang terbatas. Di sisi lain, kendala teknis dan non-teknis juga turut memengaruhi keberhasilan digitalisasi, seperti kesiapan infrastruktur di daerah tertentu, kapasitas organisasi, serta kualitas SDM (Prabowo & Lukman, 2026). Kurangnya kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem digital serta masih adanya resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi birokrasi terhadap perkembangan teknologi.

Di sisi lain, penerapan digitalisasi turut menghadirkan berbagai peluang dalam pengembangan sistem administrasi negara. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga tercipta interaksi yang lebih dinamis antara pemerintah dan masyarakat (Sulthony et al., 2025). Di sisi lainnya, penerapan sistem administrasi berbasis elektronik memberikan peluang besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Penerapan sistem berbasis elektronik juga memberikan kesempatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana masyarakat dapat mengakses informasi publik secara luas serta terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Hal ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat akuntabilitas (Juniyengsi, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan sistem digital dalam administrasi pemerintahan menunjukkan adanya keseimbangan antara peluang dan tantangan yang perlu dikelola secara optimal. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM, dukungan kebijakan, serta koordinasi antarinstansi pemerintah (Susilawati & Yanti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut dinamika tersebut, pembahasan berikut akan mengkaji secara lebih mendalam terkait tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara di era digital.

4.1 Tantangan Sistem Administrasi Negara di Era Digital

Tantangan utama dalam penerapan digitalisasi administrasi negara adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Tidak meratanya jaringan internet di berbagai wilayah Indonesia menjadi penghambat dalam implementasi layanan digital. Daerah terpencil masih menghadapi kendala dalam mengakses layanan elektronik, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik. Selain itu, kapasitas SDM yang masih terbatas menjadi hambatan signifikan. Aparatur pemerintah belum sepenuhnya memiliki kompetensi dalam mengelola sistem digital, sementara masyarakat juga masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi. Kondisi ini mengakibatkan implementasi digitalisasi belum berjalan secara maksimal (Kennedy, Surya, & Wartoyo, 2024).

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital memerlukan penyesuaian budaya kerja yang tidak mudah. Sebagian aparatur masih cenderung mempertahankan cara kerja lama, sehingga menghambat proses transformasi digital dalam administrasi negara (Sedarmayanti, 2017). Proses administrasi di instansi pemerintah seringkali menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

a. Birokrasi yang Berbelit-belit

Salah satu masalah utama dalam administrasi pemerintah adalah birokrasi yang rumit dan berlapis-lapis, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan serta pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang berbelit juga membuka celah untuk terjadinya praktik penyimpangan seperti KKN.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Sejumlah instansi pemerintah masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan teknologi yang memadai, maupun dukungan anggaran. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala dalam merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan.

c. Rendahnya Inovasi Teknologi

Dalam era digitalisasi, penerapan teknologi informasi dalam administrasi negara menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, banyak instansi pemerintah yang masih lambat dalam mengadopsi teknologi baru, baik karena keterbatasan anggaran maupun kurangnya kemampuan aparatur dalam menggunakan teknologi tersebut.

Selain hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi sistem administrasi berbasis digital juga menghadapi persoalan pada aspek tata kelola data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Banyak instansi pemerintah masih mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa standar interoperabilitas yang sama, sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi sistem dan inefisiensi dalam pengelolaan informasi. Situasi tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat serta menyulitkan perumusan kebijakan yang didasarkan pada data karena informasi yang tersedia tidak terpusat dan cenderung tersebar di berbagai platform (Setiawan & Art, 2024).

Permasalahan lain yang turut muncul adalah terkait dengan aspek keamanan informasi dalam sistem pemerintahan digital. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam administrasi publik berbanding lurus dengan meningkatnya potensi ancaman siber, seperti kebocoran data dan serangan terhadap sistem pemerintah. Hal ini menjadi tantangan serius karena menyangkut perlindungan data pribadi masyarakat serta kredibilitas institusi pemerintah. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital serta penerapan regulasi perlindungan data menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan sistem administrasi berbasis elektronik (Prayitno, 2023).

Dengan berbagai kondisi tersebut, tantangan dalam penerapan sistem administrasi negara di era digital tidak hanya terbatas pada aspek teknis, namun juga meliputi dimensi regulasi, keamanan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan agar setiap hambatan yang ada dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

4.2 Peluang Sistem Administrasi Negara di Era Digital

Di sisi lain, penerapan digitalisasi membuka peluang yang signifikan dalam meningkatkan kualitas administrasi negara. Salah satu peluang utamanya terletak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, di mana proses administrasi dapat diselenggarakan secara lebih cepat dan praktis (Hardiansyah, 2018). Selain itu, digitalisasi turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan sistem berbasis teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka, yang berpotensi mengurangi praktik penyimpangan dalam birokrasi. Di sisi lain, era digital juga membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas proses administrasi. Beberapa peluang tersebut antara lain:

a. Penerapan E-Government

Penerapan E-Government mengacu pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah dalam menyelenggarakan layanan. Melalui penerapan E-Government, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemerintah secara daring, seperti pembuatan KTP, pengurusan perizinan usaha, pembayaran pajak, serta layanan lainnya.

b. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Penerapan SIM di instansi pemerintah dapat membantu dalam mengelola data dan informasi secara lebih efisien. SIM memungkinkan adanya integrasi antara berbagai unit kerja dalam suatu instansi, sehingga mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan.

Digitalisasi juga membuka peluang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan (Dunggio, 2025).

Pengembangan sistem administrasi berbasis digital juga memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya dukungan teknologi informasi, pemerintah dapat memanfaatkan data secara lebih optimal melalui sistem yang terintegrasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (data-driven policy). Pemanfaatan big data dalam administrasi publik memungkinkan analisis kebutuhan masyarakat dilakukan secara lebih akurat, sehingga program yang dirancang dapat menjawab permasalahan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan big data dalam administrasi publik memungkinkan analisis kebutuhan masyarakat dilakukan secara lebih akurat, sehingga program yang dirancang mampu menjawab permasalahan secara efektif dan efisien (PANRB, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Konsep collaborative governance dalam era digital menjadi semakin relevan karena berbagai pihak dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui platform digital, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga mendukung terciptanya kebijakan yang inklusif dan partisipatif (Daraba et al., 2023).

Secara keseluruhan, digitalisasi dalam administrasi negara memiliki potensi besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan public. Dengan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat menyelenggarakan proses administrasi yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang kian dinamis di era globalisasi. Selain itu, digitalisasi memungkinkan terbentuknya sistem pelayanan yang lebih terintegrasi serta mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan publik secara praktis dan inklusif. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi negara perlu dilakukan secara berkelanjutan, didukung oleh penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kebijakan yang memadai, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kajian ini diarahkan untuk menguraikan sekaligus mengevaluasi secara komprehensif berbagai tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia pada era digital. Berdasarkan hasil telaah literatur, transformasi digital terbukti memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta terbukanya akses informasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain mempercepat proses administratif, digitalisasi juga mampu mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Namun demikian, implementasi digitalisasi administrasi negara tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses jaringan internet. Selain itu, tingkat literasi digital yang masih relatif rendah, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah, turut menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Tidak hanya itu, resistensi terhadap perubahan dalam lingkungan birokrasi juga menjadi kendala tersendiri, mengingat peralihan menuju sistem digital

membutuhkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta kesiapan sumber daya manusia yang tidak dapat dicapai secara instan.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, digitalisasi justru menawarkan peluang yang besar dalam pengembangan administrasi negara yang lebih modern dan adaptif. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, teknologi digital juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, baik melalui penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dukungan sistem yang terintegrasi juga membantu pemerintah dalam mengelola data secara lebih optimal, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan administrasi negara di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perubahan budaya kerja dalam birokrasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem administrasi negara yang modern, responsif, dan berbasis digital, sehingga mampu menjawab tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah perlu mengupayakan pemerataan infrastruktur teknologi informasi secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses digital. Upaya ini menjadi sangat penting guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh manfaat dari penerapan digitalisasi dalam sistem administrasi negara secara adil dan merata. Ketersediaan jaringan internet yang memadai serta dukungan sarana teknologi yang optimal akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian utama melalui penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, serta penguatan literasi digital bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknis, tetapi juga pada kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada serta mendukung implementasi sistem administrasi digital secara optimal.

Selanjutnya, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta regulasi yang mendukung proses transformasi digital secara komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi ini perlu diiringi dengan upaya mendorong perubahan budaya kerja dalam birokrasi agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, serta pengembangan sistem administrasi yang terintegrasi dan saling terhubung. Integrasi *system* yang baik akan mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih terbuka terhadap kemajuan teknologi serta berperan aktif dalam memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah. Tingginya partisipasi masyarakat akan mendukung efektivitas penggunaan layanan digital sekaligus mendorong terciptanya sistem administrasi negara yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi yang optimal, diharapkan sistem administrasi negara di era digital dapat berkembang secara lebih

maksimal. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berkelanjutan, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bank, W. (2021). *Digital Government in Indonesia: Opportunities and Challenges*. Washington D.C: World Bank.
- [2] Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin. (2023). Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia Building Innovative and Efficient Public Services in. *PALLANGGA PRAJA*, 5(1).
- [3] Databoks, K. (2025). *Penetrasi Internet di Indonesia Tahun 2025*.
- [4] Development., O. for E. C. and. (2020). *Digital Government Index 2019 Results*. Paris: OECD Publishing.
- [5] Dunggio, R. (2025). *Birokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik*. 5, 3871–3879.
- [6] Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- [7] Heeks, R. (2018). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. London: Routledge.
- [8] Indrayani, E. (2020). *E-Government Konsep, Implementasi dan perkembangannya di Indonesia* (1st ed.). Sumatera Barat: LPP Balai Insan Cendekia.
- [9] Juniyengsi, V. (2024). Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 127–151.
- [10] Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). *Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia* 4(2), 134–147.
- [11] Komarudin, D., Mu, S., Praja, S. J., & Setiawan, S. (2025). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Instrumen Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketahanan Pangan Berkelanjutan*. 8(2), 575–583.
- [12] Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., & Takdir, M. (2024). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital*. 5(1), 23–32.
- [13] Nugroho, R. (2018). *E-Government di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [14] Nugroho, Y., & Sari, D. (2022). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik di INodonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115–128.
- [15] PANRB, K. (2024). Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024.
- [16] Pasolong, H. (2019). *Teori Administtrasi Publik* (9th ed.). Bandung: Alfabeta.
- [17] Prabowo, A., & Lukman, S. (2026). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian BUMN: Tantangan, Kemajuan, Dan Prospek Ke Depan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 550–565.
- [18] Pratama, A. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–60.
- [19] Prayitno, A. (2023). *Technological Innovation in Public Administration Transformation : Case Study of e-Government Implementation in Indonesia*. 8(4).

- [20] Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- [21] Programme, U. N. D. (2022). *Governance for Sustainable Development*. New York: UNDP.
- [22] Sedarmayanti. (2017). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- [23] Setiawan, I., & Art, N. D. B. (2024). Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 234–248.
- [24] Sulthony, A., Khan, A., Nugroho, T. C., Eka, A., Ramadhan, M. N., Negara, A., & Makassar, U. N. (2025). *Pelayanan Publik Inklusif di Era Digital : Studi Aksesibilitas Website Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas Inclusive Public Service in the Digital Era : A Study on the Accessibility of Local Government Websites for Persons with Disabilities*. 1(2), 27–43. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.307>
- [25] Susilawati, F. E., & Yanti, R. (2023). *Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus : Implementasi e-Government dan Hambatannya)*. 3(2), 80–94.